

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**SUB UNIT KERJA** : KOMISIONER

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : VIRYAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 535305

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

2.370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m<sup>2</sup>/190 m<sup>2</sup> di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 396 m<sup>2</sup> di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 396 m<sup>2</sup> di MEMPAWAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 720 m<sup>2</sup> di SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
5. Tanah Seluas 200 m<sup>2</sup> di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah Seluas 851 m<sup>2</sup> di SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 7449 m<sup>2</sup> di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KOTA PONTIANAK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

137.000.000

1. MOTOR, HONDA ACF1L21B06 SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AVI414F/MINIBUS Tahun 2015, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	129.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	299.653.653
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.936.353.653
III. HUTANG	Rp.	10.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.926.353.653

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Mei 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.